



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 6133-6142

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kehidupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Gantar Kabupaten Indramayu

Iva Nurfadillah, Hamdan Hamdani

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

[iva.fadillah27@gmail.com](mailto:iva.fadillah27@gmail.com), [hamdanhamdani001@gmail.com](mailto:hamdanhamdani001@gmail.com)

### **Abstract**

*This research is motivated by the persistently high poverty rate in Indonesia, which is not only related to low community income, but also limited access to education, health, and fulfillment of basic needs. Therefore, the government introduced the Family Hope Program (PKH) as a conditional cash assistance-based social protection effort to improve the welfare of the poor. This study aims to analyze the implementation of PKH on the lives of Beneficiary Families (KPM) in Gantar Village, Indramayu Regency using descriptive qualitative research methods based on social welfare theory. The method used in this study is qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation of PKH facilitators and KPM as primary and secondary data sources. The results of the study indicate that the implementation of PKH not only functions as economic assistance, but also as an instrument of social empowerment through stages of data collection, socialization, mentoring, and Family Capacity Building Meeting (P2K2) activities that have a positive impact on community life. The research findings reveal that PKH helps fulfill daily needs, increases access to children's education, family health awareness, and strengthens household economic conditions, although there are still obstacles such as inaccurate data, low community understanding, and limited participation in mentoring activities. The implications of this research show that the success of PKH is largely determined by the quality of social assistance, data validity, and increasing community understanding so that the program can run more effectively and sustainably in improving family welfare.*

*Keywords: Beneficiary Families, Poverty, Social Welfare, Social Empowerment, Family Hope Program.*

### **1. Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan hidup yang layak [1]. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat sulit meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional, kemiskinan menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan sosial ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan perlindungan sosial dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu [2]. Salah satu bentuk kebijakan tersebut diwujudkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan [3].

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang berada di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia dan mulai dilaksanakan sejak tahun 2007. Program ini bertujuan membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bantuan diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki anak usia sekolah, ibu hamil, balita, lanjut usia, atau penyandang disabilitas [4]. Kehadiran PKH menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat miskin. Bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan sesuai ketentuan program [5]. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Gantar Kabupaten Indramayu, PKH menjadi program yang cukup dirasakan manfaatnya karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian, perdagangan

---

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kehidupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Gantar Kabupaten Indramayu

kecil, dan pekerjaan informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Kondisi tersebut membuat bantuan sosial seperti PKH memiliki peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan teori kesejahteraan sosial sebagai landasan analisis dalam melihat pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap kehidupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Teori kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, agar tercipta kehidupan yang layak dan berkeadilan sosial [6]. Dalam teori ini, bantuan sosial dipahami sebagai bentuk intervensi negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai program pemberdayaan masyarakat yang mendorong perubahan perilaku sosial melalui kewajiban memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan [7]. Dengan demikian, keberhasilan PKH tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari perubahan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat penerima manfaat.

Penelitian mengenai Program Keluarga Harapan sebelumnya telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Penelitian Rahayu et al., (2024) lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan PKH dan kendala pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia pendamping serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program [7]. Penelitian Widiyanti et al., (2022) membahas pengaruh PKH terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan menunjukkan adanya dampak positif meskipun masih terdapat kendala administrative [5]. Sementara itu, penelitian Setiyowati, (2023) menyoroti pemanfaatan bantuan PKH yang umumnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan rumah tangga [8]. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, sebagian besar kajian masih berfokus pada implementasi kebijakan dan efektivitas program secara umum. Adapun penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana pelaksanaan PKH memengaruhi kehidupan sosial dan kondisi sehari-hari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tingkat desa masih relatif terbatas, khususnya di Desa Gantar Kabupaten Indramayu. Kondisi inilah yang menjadi gap dalam penelitian ini.

Menariknya penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya melihat PKH sebagai program bantuan sosial semata, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan sosial yang memengaruhi kehidupan keluarga penerima manfaat secara langsung. Penelitian ini mengkaji dampak pelaksanaan PKH terhadap kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pola kesejahteraan keluarga di Desa Gantar Kabupaten Indramayu. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran pendamping sosial melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam membentuk perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat penerima bantuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai realitas pelaksanaan PKH pada tingkat masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kehidupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Gantar Kabupaten Indramayu serta bagaimana dampak dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PKH terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengetahui bentuk pemanfaatan bantuan oleh masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program di Desa Gantar Kabupaten Indramayu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam pengembangan kajian kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan sosial, khususnya terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan di tingkat masyarakat desa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, pendamping sosial, dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH agar lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan bantuan sosial secara tepat untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kehidupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Gantar Kabupaten Indramayu. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial masyarakat berdasarkan fakta, pengalaman, serta kondisi yang terjadi secara

langsung di lapangan sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan PKH dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat penerima manfaat [9]. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gantar Kabupaten Indramayu dengan melibatkan beberapa informan, yaitu dua masyarakat penerima bantuan PKH dan pendamping sosial PKH sebagai sumber data primer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen, foto kegiatan, arsip pelaksanaan program, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lebih lengkap, objektif, dan mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat serta proses pelaksanaan program di lapangan [10]. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan guna mengetahui pengalaman, pemanfaatan bantuan, serta perubahan yang dirasakan setelah menerima PKH, sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas pendampingan sosial dan kondisi kehidupan masyarakat penerima manfaat. Dokumentasi digunakan sebagai pendukung data penelitian berupa foto kegiatan dan dokumen terkait pelaksanaan PKH di Desa Gantar Kabupaten Indramayu. Pemilihan metode penelitian ini dinilai penting karena mampu memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pelaksanaan PKH dalam kehidupan masyarakat desa, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan dampak sosial yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini juga memiliki implikasi teoritis dan praktis, yaitu sebagai bahan pengembangan kajian kesejahteraan sosial serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pendamping sosial dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan agar lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Pelaksanaan Program PKH di Masyarakat Desa Gantar Kabupaten Indramayu**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gantar Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa program bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi bagi masyarakat miskin, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan sosial yang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara bertahap. Program ini hadir sebagai bentuk perlindungan sosial pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial melalui bantuan tunai bersyarat serta pendampingan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) [11]. Dalam konteks masyarakat Desa Gantar yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, buruh harian, dan pekerjaan informal lainnya, keberadaan PKH menjadi salah satu bentuk dukungan yang cukup penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga, terutama ketika pendapatan masyarakat tidak menentu akibat kondisi ekonomi maupun kenaikan kebutuhan pokok.

Pelaksanaan PKH di Desa Gantar dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari proses pendataan penerima bantuan, sosialisasi program, kegiatan pendampingan sosial, hingga pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Tahapan tersebut menunjukkan bahwa PKH tidak hanya berorientasi pada distribusi bantuan dana, tetapi juga menekankan aspek pembinaan sosial masyarakat agar program mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat [12]. Dalam praktiknya, pendamping sosial memiliki peran sentral sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat penerima bantuan. Pendamping tidak hanya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik, tetapi juga bertugas memberikan edukasi, pengawasan, dan motivasi kepada masyarakat agar mampu memanfaatkan bantuan secara tepat.

##### **3.1.1 Analisis Proses Penjaminan PKH**

Tahapan penjaminan atau verifikasi penerima bantuan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PKH di Desa Gantar. Proses ini dilakukan melalui pendataan dan validasi terhadap masyarakat yang dianggap layak menerima bantuan berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Pendamping PKH bersama pemerintah desa melakukan pengecekan lapangan guna memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat miskin yang membutuhkan [13]. Berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan, data penerima bantuan bersumber dari DTSEN yang sebelumnya dikenal sebagai DTKS, kemudian diverifikasi kembali oleh pendamping sosial untuk melihat kesesuaian kondisi masyarakat secara nyata. Selain melalui data pemerintah pusat, masyarakat juga dapat mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan melalui pemerintah desa atau aplikasi Cek Bansos.

Meskipun demikian, proses penjaminan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan jumlah pendamping sosial dibandingkan luas wilayah pendampingan menyebabkan pengawasan belum berjalan secara maksimal. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami mekanisme penentuan penerima bantuan sehingga

menimbulkan kesalahpahaman sosial di tengah masyarakat [14]. Kondisi ini menunjukkan bahwa akurasi data dan keterbukaan informasi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan PKH di tingkat desa. Oleh karena itu, proses validasi data secara berkala sangat penting dilakukan agar bantuan tetap tepat sasaran serta mampu mengurangi potensi kecemburuan sosial di masyarakat [15].

### 3.1.2 Analisis Program Sosialisasi PKH

Sosialisasi program menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan PKH di Desa Gantar. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan program, syarat penerimaan bantuan, hak dan kewajiban KPM, serta tata cara pemanfaatan bantuan secara tepat. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui pertemuan kelompok, kunjungan langsung ke masyarakat, maupun kegiatan bersama pemerintah desa [12]. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi tidak hanya membahas pencairan bantuan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pentingnya pendidikan anak, pemeriksaan kesehatan ibu dan balita, serta pengelolaan ekonomi keluarga secara sederhana.

Pendamping PKH berperan sebagai fasilitator sosial yang membantu masyarakat memahami bahwa bantuan PKH bukan hanya bantuan konsumtif, tetapi juga sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga penerima manfaat [11]. Dari hasil analisis lapangan, keberhasilan sosialisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi pendamping sosial dan dukungan pemerintah desa. Apabila sosialisasi dilakukan secara komunikatif dan berkelanjutan, masyarakat cenderung lebih memahami aturan program dan mampu menjalankan kewajiban dengan baik [15]. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan masyarakat yang hanya memahami PKH sebagai bantuan tunai tanpa memahami tujuan pemberdayaan sosial yang terkandung dalam program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses edukasi masyarakat masih perlu diperkuat agar program mampu menciptakan perubahan pola pikir yang lebih mandiri.

### 3.1.3 Analisis Kegiatan P2K2

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) menjadi salah satu bentuk pendampingan sosial yang cukup penting dalam pelaksanaan PKH di Desa Gantar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan keluarga penerima manfaat melalui materi pendidikan, kesehatan, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga, hingga kesejahteraan sosial [16]. Dalam pelaksanaannya, P2K2 tidak hanya menjadi ruang penyampaian materi, tetapi juga menjadi sarana diskusi antara pendamping dan masyarakat mengenai berbagai persoalan sosial yang dihadapi KPM sehari-hari.

Kegiatan P2K2 dinilai memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat penerima bantuan. Sebagian masyarakat mulai memahami pentingnya pendidikan anak, menjaga kesehatan keluarga, serta mengelola bantuan secara lebih terencana. Program ini juga membantu masyarakat membangun kesadaran bahwa bantuan sosial seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan menciptakan ketergantungan jangka panjang [17]. Akan tetapi, pelaksanaan P2K2 masih menghadapi beberapa kendala seperti rendahnya tingkat kehadiran peserta, keterbatasan waktu pendamping, dan sulitnya mengubah pola pikir sebagian masyarakat yang masih bergantung pada bantuan sosial [14]. Meskipun demikian, pendamping PKH tetap berupaya memberikan edukasi secara bertahap agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

**Tabel 1.** Analisis Pelaksanaan PKH di Desa Gantar Kabupaten Indramayu

Aspek Pelaksanaan PKH	Bentuk Pelaksanaan	Dampak Positif	Kendala yang Dihadapi
Proses Penjaminan	Pendataan, verifikasi, validasi penerima bantuan	Bantuan lebih tepat sasaran	Keterbatasan pendamping dan kurangnya pemahaman masyarakat
Sosialisasi PKH	Pertemuan kelompok dan kunjungan langsung	Masyarakat memahami hak dan kewajiban program	Sebagian masyarakat masih menganggap PKH hanya bantuan tunai
Pendampingan Sosial	Edukasi dan pengawasan KPM	Meningkatkan kesadaran pendidikan dan kesehatan	Luas wilayah pendampingan
Kegiatan P2K2	Pelatihan pendidikan,	Perubahan perilaku dan	Rendahnya partisipasi peserta

---

	kesehatan, ekonomi keluarga	peningkatan pengetahuan KPM	
<b>Pemanfaatan Bantuan</b>	Kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan	Membantu meringankan beban ekonomi keluarga	Masih terdapat ketergantungan bantuan sosial

---

Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gantar Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa program ini memiliki peran penting dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan PKH tidak hanya dilakukan melalui penyaluran bantuan tunai, tetapi juga melalui proses pendampingan sosial, sosialisasi program, serta kegiatan P2K2 yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara bertahap. Program ini memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama dalam membantu kebutuhan pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Namun demikian, pelaksanaan PKH masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan pendampingan sosial, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan P2K2, serta masih adanya pola pikir masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pendampingan, penguatan sosialisasi program, serta validasi data penerima bantuan secara berkala agar pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menciptakan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

### 3.2 Manfaat PKH bagi Kehidupan Keluarga Penerima Manfaat

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Desa Gantar Kabupaten Indramayu, manfaat PKH dapat dilihat secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, kesehatan keluarga, hingga peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa PKH memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat miskin mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan kualitas hidup secara bertahap [18].

#### 3.2.1 Membantu Kebutuhan Sehari-hari

Salah satu manfaat paling langsung dari pelaksanaan PKH adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Bantuan yang diterima KPM umumnya digunakan untuk kebutuhan pokok seperti bahan makanan, kebutuhan anak, serta perlengkapan rumah tangga dan sekolah. Dalam konteks masyarakat Desa Gantar yang sebagian besar bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap, bantuan ini menjadi penopang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga sehari-hari [18].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber 1, bantuan PKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan harian keluarga, terutama untuk membeli perlengkapan sekolah anak dan kebutuhan jajan anak. Narasumber yang bekerja sebagai pedagang kecil dan ibu rumah tangga tersebut menyampaikan bahwa meskipun bantuan PKH tidak mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, namun keberadaannya mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa PKH berfungsi sebagai bantuan komplementer yang membantu menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga miskin, meskipun masih terbatas dalam jumlah dan cakupan manfaatnya.

#### 3.2.2 Pendidikan Anak

Manfaat penting lainnya dari PKH adalah peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Bantuan PKH secara langsung mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan seperti pembelian buku, seragam, sepatu, tas, dan kebutuhan sekolah lainnya. Dengan adanya bantuan ini, keluarga penerima manfaat memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan keberlanjutan pendidikan anak tanpa harus terhambat oleh keterbatasan ekonomi [19].

Hasil wawancara dengan Narasumber 2 menunjukkan bahwa bantuan PKH sangat membantu kebutuhan pendidikan anak, terutama untuk membeli perlengkapan sekolah seperti buku, sampul buku, dan sepatu. Bahkan, dalam beberapa kondisi, sisa bantuan juga dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha kecil keluarga untuk menopang kebutuhan pendidikan anak secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya efek ganda (multiplier effect) dari PKH, yaitu tidak hanya membantu pendidikan secara langsung, tetapi juga memperkuat ketahanan

ekonomi keluarga agar anak tetap dapat bersekolah. Dengan demikian, PKH berkontribusi dalam menekan risiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga [20].

### 3.2.3 Kesehatan Keluarga

Selain pendidikan, PKH juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan akses kesehatan keluarga penerima manfaat. Program ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama bagi ibu hamil, balita, dan anak-anak, melalui fasilitas kesehatan yang telah ditentukan pemerintah [21]. Dalam konteks ini, PKH tidak hanya berperan sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen perubahan perilaku masyarakat terhadap pentingnya kesehatan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber 1, bantuan PKH juga berkontribusi dalam membantu pemenuhan kebutuhan kesehatan keluarga. Bantuan tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan dasar kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa PKH mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Gantar terhadap pentingnya menjaga kesehatan secara rutin. Dengan adanya kewajiban pemeriksaan kesehatan dalam program PKH, masyarakat secara tidak langsung terdorong untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan keluarga, sehingga kualitas kesehatan penerima manfaat dapat meningkat secara bertahap.

### 3.2.4 Ekonomi Keluarga

Dari aspek ekonomi, PKH memberikan kontribusi dalam membantu meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga penerima manfaat. Bantuan yang diterima tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha kecil sehingga membantu masyarakat dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha rumah tangga [18]. Hal ini menunjukkan bahwa PKH memiliki potensi sebagai stimulus ekonomi mikro di tingkat keluarga miskin.

Hasil wawancara dengan Narasumber 1 dan Narasumber 2 menunjukkan bahwa bantuan PKH secara bertahap membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Narasumber 1 menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat membantu terutama pada masa awal sebelum memiliki usaha warung, sedangkan Narasumber 2 memanfaatkan sebagian bantuan sebagai tambahan modal usaha kecil untuk menunjang kebutuhan pendidikan anak. Selain itu, masyarakat Desa Gantar juga menilai bahwa program PKH sudah cukup tepat sasaran bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan. Meskipun bantuan yang diberikan belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, namun keberadaannya mampu mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga dan memberikan ruang bagi keluarga untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang terbatas [20].

**Tabel 2.** Analisis Manfaat PKH di Desa Gantar Kabupaten Indramayu

Aspek Manfaat PKH	Bentuk Manfaat	Dampak pada KPM	Temuan Lapangan
<b>Kebutuhan Sehari-hari</b>	Bantuan pangan, perlengkapan rumah tangga	Mengurangi beban pengeluaran keluarga	Digunakan untuk kebutuhan sekolah dan jajan anak
<b>Pendidikan Anak</b>	Biaya sekolah, perlengkapan sekolah	Mencegah putus sekolah	Membantu buku, seragam, sepatu, dan modal usaha kecil
<b>Kesehatan Keluarga</b>	Pemeriksaan ibu hamil, balita, dan keluarga	Meningkatkan kesadaran kesehatan	Mendorong pemeriksaan rutin dan pemenuhan kebutuhan kesehatan
<b>Ekonomi Keluarga</b>	Bantuan tunai & modal usaha kecil	Menambah pendapatan keluarga	Digunakan untuk modal warung dan penguatan ekonomi rumah tangga

Berdasarkan hasil analisis, Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gantar Kabupaten Indramayu memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi kehidupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Manfaat tersebut terlihat dalam empat aspek utama, yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari, peningkatan akses pendidikan anak, peningkatan kesadaran kesehatan keluarga, serta penguatan kondisi ekonomi rumah tangga. Meskipun bantuan yang diberikan belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, PKH terbukti mampu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan memberikan dampak positif terhadap

keberlangsungan hidup keluarga penerima manfaat. Selain itu, terdapat indikasi bahwa PKH juga memiliki efek pemberdayaan secara tidak langsung melalui pemanfaatan bantuan sebagai modal usaha kecil. Dengan demikian, PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara bertahap di Desa Gantar.

### 3.3 Tantangan dan Kendala Tata Kelola Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gantar Kabupaten Indramayu

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gantar Kabupaten Indramayu pada dasarnya telah memberikan kontribusi nyata dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala tata kelola yang memengaruhi efektivitas program di tingkat lapangan. Kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan administratif, seperti ketidaktepatan data penerima bantuan, munculnya kritik masyarakat, protes sosial, serta hambatan dalam proses penyaluran bantuan [22]. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan prinsip tepat sasaran dan keadilan sosial di tingkat desa.

Secara umum, salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian data penerima bantuan dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Data penerima PKH berasal dari pusat melalui DTSEN (sebelumnya DTKS) yang kemudian diverifikasi oleh pendamping di daerah. Namun, perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang terjadi secara dinamis sering kali tidak langsung ter-update dalam sistem, sehingga menimbulkan ketidaktepatan sasaran bantuan [23]. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pendataan juga memperkuat potensi kesalahpahaman dan konflik sosial di lingkungan penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH Desa Gantar, salah satu kendala yang paling sering terjadi adalah munculnya protes masyarakat. Protes biasanya muncul ketika masyarakat merasa tidak terdaftar sebagai penerima bantuan meskipun merasa layak, atau sebaliknya terdapat penerima bantuan yang dianggap sudah tidak layak menerima PKH. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial yang cukup tinggi di masyarakat [22]. Pendamping PKH kemudian berperan sebagai mediator untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial serta mengarahkan masyarakat untuk melakukan pembaruan data melalui sistem resmi.

Selain persoalan data dan protes sosial, kendala teknis juga sering terjadi dalam proses penyaluran bantuan. Permasalahan seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang hilang, rusak, atau terblokir menyebabkan keterlambatan pencairan bantuan. Penyelesaian masalah ini membutuhkan koordinasi antara pendamping PKH, pihak perbankan, dan instansi terkait sehingga prosesnya sering memakan waktu cukup lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran bantuan sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga [24].

**Tabel 3.** Analisis Kendala Tata Kelola PKH di Desa Gantar Kabupaten Indramayu

Aspek Kendala	Bentuk Permasalahan	Dampak di Lapangan	Faktor Penyebab
<b>Data Penerima Bantuan</b>	Ketidaksesuaian data DTSEN/DTKS dengan kondisi riil	Salah sasaran bantuan, ketidakpuasan masyarakat	Data tidak update, perubahan ekonomi masyarakat
<b>Protes Sosial</b>	Keluhan masyarakat tidak menerima bantuan / penerima tidak layak	Kecemburuan sosial, konflik kecil di masyarakat	Persepsi ketidakadilan, kurang pemahaman mekanisme
<b>Sosialisasi &amp; Pemahaman</b>	Masyarakat belum memahami mekanisme PKH	Salah persepsi terhadap program bantuan	Kurangnya edukasi dan komunikasi
<b>Penyaluran Bantuan</b>	KKS hilang, rusak, atau terblokir	Keterlambatan pencairan bantuan	Kendala administrasi dan perbankan
<b>Koordinasi Lembaga</b>	Proses penyelesaian masalah lambat	Efektivitas program menurun	Koordinasi antar instansi belum optimal

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Gantar Kabupaten Indramayu masih menghadapi berbagai kendala tata kelola yang cukup kompleks. Kendala utama terletak pada ketidaksesuaian data penerima bantuan dengan kondisi riil masyarakat, munculnya protes sosial akibat persepsi ketidakadilan, serta hambatan teknis dalam penyaluran bantuan seperti masalah KKS. Selain itu, rendahnya

pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program juga memperkuat potensi konflik sosial di tingkat desa. Meskipun pendamping PKH telah berperan sebagai mediator dan fasilitator, efektivitas program masih sangat bergantung pada validitas data, kualitas komunikasi sosial, serta koordinasi antar lembaga pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pendataan, peningkatan sosialisasi, serta perbaikan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

### **3.4 Peran Strategis Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Desa Gantar Kabupaten Indramayu**

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki posisi yang sangat strategis dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial di masyarakat. Pendamping tidak hanya berfungsi sebagai pengawas penyaluran bantuan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator sosial yang mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memahami, menjalankan, serta memanfaatkan bantuan sesuai tujuan program. Selain itu, pendamping juga berperan dalam memberikan sosialisasi, membantu administrasi, serta menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang muncul di lapangan. Keberadaan pendamping menjadi elemen penting agar pelaksanaan PKH dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan [25].

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH Desa Gantar, salah satu tugas utama yang dijalankan adalah mendorong perubahan perilaku KPM dari pola konsumtif menjadi lebih produktif. Pendamping tidak hanya berfokus pada aspek penyaluran bantuan, tetapi juga berupaya membangun kemandirian keluarga penerima manfaat melalui pendekatan edukatif. Dalam hal ini, pendamping memiliki tanggung jawab untuk membantu memutus rantai kemiskinan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial, melainkan mampu meningkatkan kesejahteraan secara bertahap.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, pendamping PKH berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat penerima bantuan. Pendamping memastikan bahwa KPM memahami hak dan kewajiban mereka sebagai penerima bantuan sosial serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program dengan baik [26]. Berdasarkan hasil wawancara, pendamping PKH Desa Gantar yang telah menjalankan tugas sejak tahun 2008 menyampaikan bahwa pengalaman panjang tersebut membuatnya lebih memahami kondisi sosial masyarakat serta berbagai permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan program. Pengalaman tersebut juga memperkuat kemampuan pendamping dalam melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat secara lebih efektif dan humanis.

Selain itu, pendamping PKH juga memiliki peran penting dalam kegiatan sosialisasi program kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan PKH, mekanisme penyaluran bantuan, serta pentingnya pemenuhan aspek pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat [27]. Berdasarkan hasil wawancara, pendamping PKH Desa Gantar menjelaskan bahwa salah satu metode yang digunakan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat adalah melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Kegiatan ini menjadi sarana edukasi yang berkelanjutan agar KPM dapat lebih berdaya, memiliki pengetahuan yang lebih baik, serta mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara bertahap.

Peran pendamping juga mencakup aspek administrasi dalam pelaksanaan program. Pendamping bertugas melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan yang bersumber dari DTSEN (sebelumnya DTKS), serta membantu masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan melalui pemerintah desa maupun aplikasi Cek Bansos [24]. Dalam praktiknya, pendamping juga menghadapi berbagai tantangan seperti masyarakat yang melakukan protes karena tidak menerima bantuan, kesalahan penetapan sasaran penerima, hingga kendala teknis seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang hilang, rusak, atau terblokir. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pendamping memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai arahan Kementerian Sosial serta mengarahkan masyarakat untuk menggunakan mekanisme resmi yang tersedia agar permasalahan dapat diselesaikan secara prosedural.

Secara keseluruhan, peran pendamping PKH di Desa Gantar tidak hanya terbatas pada aspek teknis pelaksanaan program, tetapi juga mencakup fungsi sosial sebagai mediator, edukator, dan fasilitator masyarakat. Kemampuan komunikasi, pendekatan sosial, serta pemahaman terhadap kondisi masyarakat menjadi faktor penting dalam

menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan yang muncul di lapangan. Dengan demikian, peran pendamping sangat menentukan efektivitas pelaksanaan PKH dalam mencapai tujuan utama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Riswanto, 2018).

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kehidupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Gantar Kabupaten Indramayu, dapat disimpulkan bahwa PKH memiliki peran yang signifikan sebagai instrumen perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pelaksanaan PKH tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan tunai, tetapi juga mencakup proses pendataan, sosialisasi, pendampingan sosial, serta kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara bertahap. Program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap kehidupan KPM, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, peningkatan akses pendidikan anak, peningkatan kesadaran kesehatan keluarga, serta penguatan kondisi ekonomi rumah tangga. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala seperti ketidaktepatan data penerima bantuan, keterbatasan sumber daya pendamping, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan P2K2, serta munculnya protes sosial akibat persepsi ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Di sisi lain, peran pendamping PKH sangat penting sebagai fasilitator, mediator, dan edukator yang menjembatani pemerintah dengan masyarakat, sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuan. Dengan demikian, keberhasilan PKH di Desa Gantar sangat ditentukan oleh sinergi antara validitas data, efektivitas pendampingan, kualitas sosialisasi, serta partisipasi aktif masyarakat, sehingga program ini tidak hanya bersifat bantuan sosial, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

#### Referensi

- [1] S. N. R. Afrial Insani, Firma Nanda, "Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan," *J. Ilm. Ekon. Dan Manaj.*, vol. 3, no. 10, pp. 626–632, 2025.
- [2] Habibullah, "Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia," *Sosio Inf.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–14, 2017, doi: 10.33007/inf.v3i1.492.
- [3] M. Sabarisman and Suradi, "Bantuan Pangan, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial: Kasus di Belitung Timur," *Sosio Inf.*, vol. 9, no. 03, pp. 285–294, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/492>
- [4] L. Sari, Sugianor, and Munawarah, "Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengeantasan Kemiskinan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara," *J. Kebijak. Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 172–184, 2025.
- [5] H. Widiyanti, N. U. Ati, and Hayat, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 6, no. 2, pp. 16484–16490, 2022, doi: 10.31004/jptam.v6i2.5055.
- [6] Syamsuddin, A. B. *Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial. BuatBuku.com*, 2017.
- [7] Q. S. Rahayu, N. M. N. Suryanti, Suud, and Masyhuri, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Penanggulangan Kemiskinan di Desa Gerung Permai," *J. Ilm. Profesi Pendidik.*, vol. 9, no. 1, pp. 419–425, 2024, doi: 10.29303/jipp.v9i1.2035.
- [8] L. Setiyowati, "Pemanfaatan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Tahun 2022 oleh Masyarakat Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 7, no. 3, pp. 29278–29289, 2023, doi: 10.31004/jptam.v7i3.11685.
- [9] L. J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Edisi revisi. PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, interaktif dan konstruktif)*. 2022.
- [11] A. N. Chasanah and A. Hamid, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang," *TUTURAN J. Ilmu Komunikasi, Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 2, pp. 53–67, 2024, doi: 10.47861/tuturan.v2i2.917.
- [12] S. A. Puntorini and E. P. Purnomo, "Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Rangka Pengurangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2018," *JKKP (Jurnal Kesejaht. Kel. dan Pendidikan)*, vol. 7, no. 2, pp. 230–242, 2020, doi: 10.21009/JKKP.072.10.
- [13] E. Rahmawati and B. Kisworo, "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan," *J. Nonform. Educ. Community Empower.*, vol. 1, no. 2, pp. 161–169, 2017, doi: 10.15294/pls.v1i2.16271.
- [14] H. Salmah, T. R. Wulan, R. Rostikawati, and Maskurin, "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui P2K2 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor," *Arus J. Sos. dan Hum.*, vol. 5, no. 2, pp. 2486–2494, 2025, doi: 10.57250/ajsh.v5i2.1260.
- [15] A. Tiansah, "Proses Komunikasi dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan," *Kinesik J. Kinesik*, vol. 10, no. 3, pp. 285–300, 2023.
- [16] Aribowo and L. F. Sutiaputri, "Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH) di Komunitas Adat Kampung Kuta, Desa Karang Paninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis," *LINDAYASOS J. Ilm. Perlindungan Pemberdaya. Sos.*, vol. 1, no. 1, pp. 85–110, 2019, doi: 10.31595/lindayasos.v1i1.173.
- [17] S. Beni, "Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga dalam Mempercepat Perubahan Perilaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan," *Salus Cult. J. Pembang. Mns. Dan Kebud.*, vol. 3, no. 2, pp. 147–155, 2023, doi: 10.55480/saluscultura.v3i2.97.
- [18] I. A. Nurrohmah and T. Rahaju, "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto," *J. Publika*, vol. 7, no. 7, pp. 1–7, 2019, doi: 10.26740/publika.v7n7.p%25p.
- [19] R. Prasasti and S. M. S. Harianto, "Makna Pendidikan Anak bagi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)," *J. Paradig.*, pp. 1–6, 2018.
- [20] A. F. Ardiyanto and I. Prabawati, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9444>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

- Nganjuk (Studi pada Bidang Pendidikan),” *J. Publika*, vol. 9, no. 1, pp. 13–24, 2021, doi: 10.26740/publika.v9n1.p13-24.
- [21] I. M. Adnin Chiesa Syahwanes, Eli Apud Saepudin, Listia Ulya Madina, Shabna Azzahra, “Evaluasi Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” *Ekopedia J. Ilm. Ekon. Online ISSN 3089-8374 Vol. 1, No. 2, Juni 2025 doi.org/10.63822/j6s5v471 Hal. 176-183 Beranda J. https://indojournal.com/index.php/ekopedia Eval.*, vol. 1, no. 2, pp. 176–183, 2025.
- [22] M. Zaini and A. Nurjaman, “The Implementation of the Family Hope Program ( PKH ) During the Pandemic in Batu City,” *J. Gov. Polit. Soc.*, vol. 10, no. 2, pp. 159–169, 2022, doi: 10.31289/jppuma.v10i2.7179.
- [23] H. Nuraeni, T. A. Bangsawan, and R. Amilia, “Implementasi Pelayanan Publik dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH),” *J. Birokrasi*, vol. 5, no. 3, pp. 2856–2865, 2025, doi: 10.53363/bureau.v5i3.770.
- [24] P. Pamungkas and M. Khozin, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Sriharjo Kabupaten Bantul,” *JMPKP J. Manaj. Publik dan Kebijakan. Publik*, vol. 7, no. 2, p. 2025, 2025, doi: 10.36085/jmpkp.v7i2.8402.
- [25] Riswantoro, “Penyaluran Dari Tunai ke Non Tunai: Studi Peran Pendamping dalam Mengawal Konversi PKH di Dlingo,” *J. Pemberdaya. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 43–66, 2018, doi: 10.14421/jpm.2018.021-03.
- [26] Muhtadi and I. Choirunnisa, “Implikasi Kualitas Pelayanan Program Keluarga Harapan terhadap Kepuasan Penerima Manfaat di Kelurahan Beji Depok,” *J. Pemberdaya. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 397–424, 2019, doi: 10.14421/jpm.2019.032-08.
- [27] A. Restianti, “Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH),” *J. Pemberdaya. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 405–426, 2017, doi: 10.14421/jpm.2017.012-10.